

## STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

**Sabbir Akhtar, Muhammad Rizki, Muhammad Ichsan Dahlan, Ronny Edward**

*sabbirakhtar12373@gmail.com, muhammadrizkqii110@gmail.com,*

*ichsandahlann78@gmail.com, r.edwardutama@umj.ac.id*

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sektor UMKM ini menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan menggerakkan sumber daya lokal untuk menopang perekonomian daerah. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah harus dimaksimalkan UMKM dapat berdaya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi di Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi dan studi dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Fokus penelitian ini berdasarkan dari dimensi pokok strategi yaitu diantaranya inovasi, deferensiasi pasar, jangkauan dan pengendalian biaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM belum berjalan secara optimal. Karena pembinaan dari pemerintah ini belum dapat dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM. Selanjutnya para UMKM tidak mendapatkan bantuan modal dari pemerintah daerah, dan sementara ini masih banyak UMKM yang belum mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Selain itu, pemerintah sedikit membantu mengatasi masalah keterbatasan anggaran dengan mengajak partisipasi dari BUMN dan swasta dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM.

### ABSTRACT

*This research is motivated by the fact that the MSME sector is superior in absorbing labor by mobilizing local resources to support the regional economy. So that the empowerment carried out by the government must be maximized so that MSMEs can be competitive. This research aims to analyze the strategy at the Department of Cooperatives and MSMEs in empowering and developing MSMEs. This research uses a qualitative approach with a case study method. The data collection technique used is observation and study of documents/notes/reports and statutory regulations related to the problem under study. The focus of this research is based on the main dimensions of strategy, namely innovation, market differentiation, reach and cost control. The results of this research show that the strategy of the Department of Cooperatives and MSMEs in*

*empowering MSMEs has not worked optimally. Because this guidance from the government cannot yet be felt by all MSME players. Furthermore, MSMEs do not receive capital assistance from the regional government, and currently there are still many MSMEs that have not received guidance from the government. Apart from that, the government is helping a little to overcome the problem of budget constraints by inviting participation from BUMN and the private sector in implementing MSME empowerment.*

**Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).**

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Dari total unit kerja yang ada di Indonesia, 99,9% adalah UMKM. Tenaga kerja yang mampu diserap sebanyak 97,16% dari total unit usaha dan berkontribusi terhadap 59,08% PDB [1]. Buku [2], menyebutkan bahwa UMKM merupakan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. UMKM sangat rentan terhadap masalah-masalah perekonomian. Maka dari itu, penelitian ini akan menunjukkan cara pemberdayaan kepada UMKM. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam hal ini, UMKM merupakan cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM mampu memperluas lapangan kerja untuk memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang sering di sebut dengan (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perkonomian lokal, dengan adanya sektor UMKM dapat menjadikan sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Meskipun demikian produktivitas UMKM belum menunjukan perkembangan yang berarti dalam perekonomian nasional. Banyak jumlah UMKM di setiap daerah belum didukung dengan kualitas, sehingga kontribusinya terhadap pengembangan usaha rakyat dan perkonomian secara umum kurang optimal dibandingkan dengan usaha besar hal ini dikarenakan sektor UMKM masih mengalami hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa UMKM perlu di berdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengembangan serta pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan

pemberdayaan masyarakat melalui UMKM ini adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksana pemberdayaan perlu di landasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam menumbuhkan UMKM di daerahnya yang relatif lebih mudah dikembangkan. Pemerintah daerah harus memperhatikan tumbuh kembangnya lapangan usaha, karena pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata untuk UMKM dalam mempertahankan produknya saat terjadi serbuan barang impor di pasar dalam negeri. Kebijakan pemerintah dalam membantu peningkatan kualitas dan daya saing terhadap produk UMKM bisa dilakukan dengan cara pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi yang ada, pembinaan pada aspek manajemen, pembaharuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Perlindungan kepada para pelaku usaha dilakukan untuk membantu pengembangan dan perluasan akses pasar atau pengguna jasa dengan cara melakukan promosi dan mengembangkan jejaring yang membantu promosi, Membuka pameran, Melakukan kerjasama agar bisa mempermudah hubungan antara pihak pembeli dan bisa membangun mitra usaha besar. Pengembangan UMKM dilakukan supaya bisa membantu dalam mendirikan usaha-usaha baru dan profesional yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang baik sehingga menciptakan iklim yang kondusif dalam keberhasilan para pelaku usaha untuk bersaing dan bisa memanfaatkan peluang dengan baik.

## TINJAUAN TEORI

Definisi UMKM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbeda-beda. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa ,usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun usaha kecil berdasarkan Undang-undang tersebut adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. Usaha Menengah berdasarkan Undang-undang tersebut adalah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia saat ini diharapkan bisa menjadi pilar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

UMKM memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, dengan adanya UMKM bisa mengurangi angka pengangguran dan UMKM juga sekarang bukan hanya di pandang sebelah mata oleh pengusaha kelas atas tetapi menghargai para pelaku usaha kecil saat ini. UMKM saat ini bukan hanya menjadi pilar tetapi juga menjadi kebutuhan untuk orang yang membutuhkan pekerjaan (Heri, 2019). Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha kecil menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan ataupun cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian. Baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau juga hasil penjualan tahunan sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang. Sedangkan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori dan Komariah, 2017: 25).

Studi ini merupakan penelitian kebijakan (*policy research*) yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi berkaitan dengan UMKM dalam rangka memberikan rekomendasi pengambilan kebijakan pengembangannya.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini membahas pengembangan dan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah. Adanya fakta bahwa sektor UMKM ini menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan menggerakkan sumber daya lokal untuk menopang perekonomian daerah. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah harus dimaksimalkan UMKM dapat berdaya saing. Berdasarkan penjelasan Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang

UMKM menyatakan bahwa UMKM perlu di berdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengembangan serta pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM ini adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksana pemberdayaan perlu di landasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam menumbuhkan UMKM di daerahnya yang relatif lebih mudah dikembangkan. Pemerintah daerah harus memperhatikan tumbuh kembangnya lapangan usaha, karena pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata untuk UMKM dalam mempertahankan produknya saat terjadi serbuan barang impor di pasar dalam negeri. Kebijakan pemerintah dalam membantu peningkatan kualitas dan daya saing terhadap produk UMKM bisa dilakukan dengan cara pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi yang ada, pembinaan pada aspek manajemen, pembaharuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Perlindungan kepada para pelaku usaha dilakukan untuk membantu pengembangan dan perluasan akses pasar atau pengguna jasa dengan cara melakukan promosi dan mengembangkan jejaring yang membantu promosi, Membuka pameran, Melakukan kerjasama agar bisa mempermudah hubungan antara pihak pembeli dan bisa membangun mitra usaha besar. Pengembangan UMKM dilakukan supaya bisa membantu dalam menjadikan UMKM menjadi sumber pendapatan masyarakat dan sebagai pilar dalam meningkatkan pertumbuhan nasional.

## KESIMPULAN

Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal, dengan adanya sektor UMKM dapat menjadikan sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Meskipun demikian produktivitas UMKM belum menunjukan perkembangan yang berarti dalam perekonomian nasional. Namun, UMKM merupakan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. UMKM sangat rentan terhadap masalah-masalah perekonomian. Oleh karena itu, UMKM harus diberi pengembangan dan pemberdayaan oleh pemerintah secara maksimal agar dapat daya saing sesuai Undang-undang No.20 tahun 2008. Pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan lapangan usaha dan memberikan kontribusi nyata untuk UMKM karena pemerintah memiliki peran yang strategis dalam perumbuhan UMKM. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM dapat dilakukan secara berdampingan,

seperti memberi pelatihan, pengarahan pengembangan teknologi yang ada, pembinaan kepada aspek manajemen, pembaharuan teknologi untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas, perlindungan kepada para pelaku usaha, dan perluasan pasar. Pengembangan UMKM dilakukan supaya UMKM bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat dan dapat menopang serta menjadi pilar peningkatan perekonomian Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Noor, Munawar. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah. Vol 1, No (2), hal 88-89. Universitas Diponegoro.

Said, Abdullah. (2019). Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No (2), hal 213-215. Universitas Brawijaya.

Soejodono, T. S. ( 2004). Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Jakarta: Ghalia Indonesia

Darna, Fatimah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, VOL 10, NO. 2, Desember 2011 : 127-138

Nurul Fadzillah, 150802061 (2019) *Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM*. Skripsi thesis, UIN Ar-raniry Banda Aceh.